

**PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI INTEGRITAS DAN
ANTI-KORUPSI: TELAAH PEMIKIRAN DAN PRAKTIK
KENEGARAAN DENNY INDRAYANA DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**Character Education Based on Integrity and Anti-Corruption Values:
A Review of Denny Indrayana's Thought and Statecraft Practices
from the Perspective of Islamic Religious Education**

**Rizky Firnanda¹, Muhammad Ahsan Sachrawi Rafli²,
Annisa Nur Asyiah³, Fathya Shafa Diani⁴**

^{1,3,4}Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; ²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
firnandarizky88@gmail.com; sachrawimuhammadahsan@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 29, 2026	Jul 27, 2026	Aug 8, 2026	Aug 13, 2026

Abstract

Character education based on integrity and anti-corruption values is an urgent necessity amid the continued prevalence of corrupt practices across various sectors of life. This condition underscores the importance of strengthening students' character through education that instills honesty, responsibility, and moral awareness from an early age. This study aimed to analyze Denny Indrayana's ideas and state governance practices concerning integrity and anti-corruption values and their relevance to Islamic Religious Education (PAI). This study employed a qualitative approach using the literature review method. Data were obtained from books, scholarly journals, articles, and works by Denny Indrayana addressing integrity, law enforcement, good governance, and corruption eradication. The data were analyzed descriptively and analytically through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that Denny Indrayana's ideas position integrity, honesty, accountability,

transparency, and moral courage as the principal foundations for realizing clean and corruption-free governance. These values are strongly relevant to the principles of PAI, namely trustworthiness, *sidq* (honesty), justice, responsibility, and *ihsan*. This alignment indicates that integrity and anti-corruption values can be internalized through PAI instruction to develop students who possess ethical character and moral commitment. This study concludes that Denny Indrayana's ideas are relevant as a conceptual foundation for developing character education based on integrity and anti-corruption values. Integrating these values into PAI instruction has implications for strengthening a sustainable anti-corruption culture in educational settings and society.

Keywords: Anti-Corruption; Denny Indrayana; Integrity Values; Islamic Religious Education; Character Education

Abstrak: Pendidikan karakter berbasis integritas dan antikorupsi merupakan kebutuhan mendesak di tengah masih maraknya praktik korupsi dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan karakter peserta didik melalui pendidikan yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran moral sejak dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana mengenai nilai integritas dan antikorupsi serta relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya Denny Indrayana yang membahas integritas, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Denny Indrayana menempatkan integritas, kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keberanian moral sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip PAI, yaitu amanah, *sidq* (kejujuran), keadilan, tanggung jawab, dan *ihsan*. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa nilai integritas dan antikorupsi dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran PAI untuk membentuk karakter peserta didik yang beretika dan memiliki komitmen moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Denny Indrayana relevan sebagai landasan konseptual bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis integritas dan antikorupsi. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran PAI berimplikasi pada penguatan budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Kata Kunci: Antikorupsi; Denny Indrayana; Nilai Integritas; Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial. Namun, berbagai kasus korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan karakter berbasis integritas belum berjalan secara optimal. Korupsi tidak hanya

mengakibatkan kerugian ekonomi dan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan krisis moral yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat (Mahendra & Saputra, 2026). Kondisi tersebut menjadikan pendidikan karakter berbasis nilai integritas dan anti-korupsi sebagai isu yang penting dan relevan untuk dikaji dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI).

Menanggapi persoalan tersebut, peneliti berpandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum dan penindakan semata, tetapi juga harus dilakukan melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik melalui internalisasi nilai amanah, kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), tanggung jawab, dan istiqamah. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pendidikan karakter berbasis nilai anti-korupsi dalam perspektif Pendidikan Agama Islam serta pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pendidikan karakter dan anti korupsi dalam tingkat perguruan tinggi (Burhanudin, 2022). Sementara itu, berbagai kajian tentang pendidikan anti-korupsi lebih banyak berfokus pada implementasi kurikulum, strategi pembelajaran, atau analisis konsep nilai anti-korupsi dalam Islam. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan pemikiran tokoh kontemporer Indonesia dengan pengembangan pendidikan karakter berbasis integritas dan anti-korupsi masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang mengkaji pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana dalam perspektif Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui kajian tokoh terhadap pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana yang dikenal memiliki komitmen kuat terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep pendidikan karakter, teori integritas, serta nilai-nilai moral dalam Pendidikan Agama Islam sebagai landasan analisis. Nilai integritas yang diperjuangkan Denny Indrayana dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dalam pemikiran serta praktik kenegaraan Denny Indrayana dan mengkaji

relevansinya dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai integritas yang terkandung dalam gagasan dan praktik kenegaraan Denny Indrayana serta menjelaskan kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai anti-korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam dan pendidikan karakter, sekaligus menjadi referensi dalam upaya penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

METODE

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi tokoh (*biographical study*). Penelitian studi tokoh dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana terkait nilai integritas dan anti-korupsi serta relevansinya dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, gagasan, pengalaman, dan kontribusi tokoh secara komprehensif berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi tokoh dengan fokus pada eksplorasi, deskripsi, dan interpretasi pemikiran Denny Indrayana mengenai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan. Proses penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

3. Partisipan dan teknik sampling

Partisipan utama dalam penelitian ini adalah Denny Indrayana sebagai tokoh yang menjadi objek kajian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa Denny Indrayana memiliki kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan berbagai sumber tertulis sebagai data pendukung.

4. Instrumen dan teknik pengumpulan data

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi:

- a) Pedoman wawancara semi-terstruktur.
- b) Lembar dokumentasi.
- c) Format pencatatan studi literatur.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), untuk memperoleh informasi langsung mengenai pandangan Denny Indrayana tentang integritas, pendidikan karakter, dan anti-korupsi.
- b) Dokumentasi, dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti buku, artikel, jurnal, pidato, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan penelitian.
- c) Studi Literatur, untuk memperkuat landasan teori dan membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi:

- a) Pengumpulan data, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur.
- b) Reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian.
- c) Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis
- d) Penarikan Kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk memperoleh temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian (Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi literatur sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai integritas dan anti-korupsi merupakan tema sentral dalam pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana. Temuan utama mengungkap bahwa integritas, kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keberanian moral menjadi prinsip yang secara konsisten diperjuangkan dalam berbagai kebijakan dan gagasannya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan Pendidikan Agama Islam, terutama konsep amanah, *sidiq* (kejujuran), adil, tanggung jawab, dan ihsan. Berdasarkan analisis data, integritas menjadi nilai yang paling dominan karena dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan. Visualisasi data hasil penelitian disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1. Tabel 1 menunjukkan keterkaitan antara nilai integritas yang dikemukakan Denny Indrayana dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam.

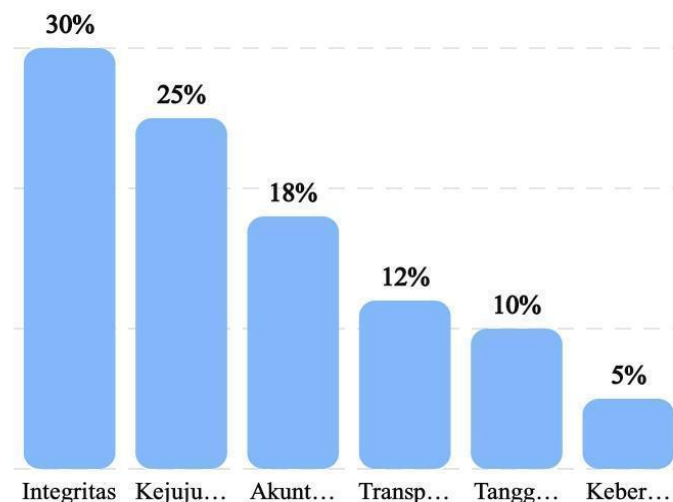
Sementara itu, Gambar 1 menggambarkan tingkat dominasi nilai yang ditemukan dalam analisis data penelitian. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran menempati posisi tertinggi dibandingkan nilai lainnya, diikuti oleh akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keberanian moral. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan karakter berbasis integritas memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran anti-korupsi peserta didik. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa data negatif atau anomali. Dalam praktik kenegaraan, implementasi nilai integritas tidak selalu berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor politik, budaya birokrasi, dan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat kesenjangan antara pemahaman nilai anti-korupsi dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter tidak cukup hanya melalui pemahaman konseptual, tetapi juga memerlukan keteladanan, sistem yang mendukung, serta budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.

Tabel 1. Keterkaitan Nilai Integritas Denny Indrayana dengan Pendidikan Agama Islam

Nilai integritas	Konsep dalam PAI	Relevansi
Integrasi	Amanah	Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
Kejujuran	Sidiq	Bersikap jujur dalam perkataan dan tindakan
Akuntabilitas	Mas'uliyah	Bertanggungjawab atas setiap keputusan
Transparansi	Tabyin	Keterbukaan dalam pengelolaan amanah publik
Keadilan	Adil	Menegakkan keadilan tanpa diskriminasi
Keberanian moral	Istiqamah	Konsisten dalam menegakkan kebenaran

Tabel 1. Keterkaitan Nilai Integritas Denny Indrayana dengan Pendidikan Agama Islam menunjukkan adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai integritas yang diperjuangkan Denny Indrayana dengan konsep-konsep utama dalam Pendidikan Agama Islam. Nilai integritas dikaitkan dengan amanah yang mengajarkan pentingnya menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan penuh kejujuran. Nilai kejujuran memiliki relevansi dengan konsep sidiq yang menuntut kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan konsep mas'uliyah yang menekankan pertanggungjawaban setiap tindakan, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Swt. Selain itu, transparansi memiliki hubungan dengan konsep tabyin yang mengandung makna keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan pengelolaan amanah publik secara jujur. Nilai keadilan berkaitan dengan konsep al-'adl yang menekankan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, sedangkan keberanian moral relevan dengan konsep istiqamah yang mengajarkan konsistensi dalam mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Denny Indrayana mengenai integritas tidak hanya memiliki dimensi hukum dan pemerintahan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fundamental dalam Pendidikan Agama Islam.

Dominasi nilai dalam hasil penelitian, Persentase dominasi nilai yang ditemukan dalam analisis data.



Gambar 1. Dominasi Nilai dalam Hasil Penelitian

Keterangan: Persentase pada grafik merupakan hasil kategorisasi temuan penelitian dan digunakan untuk menunjukkan tingkat dominasi masing-masing nilai dalam pemikiran serta praktik kenegaraan Denny Indrayana

Gambar 1. Dominasi Nilai dalam Hasil Penelitian menggambarkan tingkat dominasi nilai-nilai yang ditemukan dalam analisis data penelitian. Nilai integritas dan kejujuran menempati posisi yang paling dominan dibandingkan nilai lainnya karena keduanya dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter antikorupsi. Selanjutnya, nilai akuntabilitas dan transparansi menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola yang baik dalam kehidupan publik, sedangkan tanggung jawab dan keberanian moral menjadi unsur pendukung yang memperkuat konsistensi individu dalam menjalankan nilai-nilai integritas. Dominasi nilai integritas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh penguasaan aspek kognitif peserta didik, tetapi juga oleh kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Gambar 1 tidak hanya menunjukkan distribusi temuan penelitian, tetapi juga menegaskan bahwa integritas merupakan nilai utama yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Agama Islam sebagai upaya preventif dalam membangun budaya antikorupsi.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pendidikan karakter berbasis nilai integritas dan antikorupsi dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Nilai Integritas merupakan pendidikan karakter yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan peduli terhadap sosial (Afif Amroella, dkk. 2026). Dalam berbagai gagasan dan kiprahnya di bidang hukum serta tata kelola pemerintahan, Denny Indrayana secara konsisten menegaskan pentingnya penegakan hukum yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Nilai-nilai tersebut selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan amanah, keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan tanggung jawab sebagai karakter utama yang harus dimiliki setiap individu. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya berorientasi pada pembentukan aspek spiritual peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran moral agar mampu menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan karakter berbasis nilai integritas dan antikorupsi dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Nilai integritas yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan keberanian moral menjadi fondasi

utama dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori pendidikan karakter Thomas Lickona yang menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak hanya berorientasi pada moral *knowing*, tetapi juga moral *feeling* dan moral *action* (Susanti, 2022). Dengan demikian, integritas tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku nyata yang tercermin dalam kehidupan pribadi maupun sosial

Temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh nilai integritas yang dikemukakan Denny Indrayana memiliki relevansi dengan konsep-konsep utama dalam Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis integritas dapat diimplementasikan melalui penguatan nilai amanah, *sidiq*, *mas'uliyah*, *tabyin*, *al-'adl*, dan istiqamah dalam proses pembelajaran. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadi penting karena korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan moral yang lahir dari lemahnya integritas individu maupun sistem yang berlaku. Sementara itu, Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai integritas dan kejujuran menjadi nilai yang paling dominan dalam hasil penelitian. Dominasi kedua nilai tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu dimulai dari pembentukan karakter yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab sejak usia dini. Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui pembiasaan, keteladanan, dan penguatan budaya sekolah yang berorientasi pada integritas.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan keteladanan para pemimpin publik. Dengan demikian, pembentukan budaya antikorupsi dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai integritas dan antikorupsi tidak cukup diwujudkan melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi harus diinternalisasikan melalui proses pembiasaan, keteladanan, serta budaya yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Pemikiran Denny Indrayana memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan perubahan budaya yang dimulai dari

pembentukan karakter sejak usia dini. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, proses tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, seperti amanah, istiqamah, ihsan, tanggung jawab, dan keadilan ke dalam setiap aktivitas pendidikan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan moral.

Temuan penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam membangun perilaku antikorupsi. Penelitian Taja dan Aziz (2016) menjelaskan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam mampu meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya kejujuran dan tanggung jawab (Nadri Taja, 2016). Selain itu, penelitian Suyadi dkk. (2019) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila dipadukan dengan pembelajaran agama sehingga mampu membentuk karakter yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang kuat (Suyadi, dkk. 2019). Di sisi lain, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah, tetapi juga mengkaji pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana sebagai sumber nilai yang dapat diintegrasikan ke dalam Pendidikan Agama Islam. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas bahwa pendidikan karakter tidak hanya bersumber dari teori pendidikan, tetapi juga dapat dikembangkan melalui refleksi terhadap praktik kepemimpinan, reformasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya kajian pendidikan karakter melalui pendekatan multidisipliner yang menghubungkan bidang hukum, pemerintahan, dan pendidikan Islam.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, khususnya sekolah dan perguruan tinggi, perlu memperkuat pendidikan karakter dengan mengintegrasikan nilai integritas dan antikorupsi ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, serta budaya organisasi. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis sebagai teladan sekaligus fasilitator dalam menanamkan nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan kepada peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi

pengambil kebijakan pendidikan untuk mengembangkan program pendidikan antikorupsi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman sehingga pembentukan karakter tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada cakupan narasumber atau informan yang diwawancarai sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh tentang implementasi nilai-nilai integrasi dan antikorupsi dari pemikiran Denny Indrayana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, pada penelitian ini belum melakukan observasi secara langsung terhadap pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas jumlah dan dapat menggunakan teknik observasi sehingga dapat memperoleh gambaran secara mendalam.

Integritas sebagai Moral Action dalam Praktik Kenegaraan Denny Indrayana dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam

Integritas merupakan salah satu nilai fundamental dalam pendidikan karakter yang memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta memiliki keberanian untuk mempertahankan nilai kebenaran dalam berbagai situasi. Dalam kajian pendidikan karakter, Thomas Lickona menjelaskan bahwa karakter yang baik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang mengetahui apa yang benar (*moral knowing*), tetapi juga mencintai nilai-nilai kebaikan tersebut (*moral feeling*) dan mewujudkannya dalam tindakan nyata (*moral action*). Konsep moral action menjadi sangat penting karena keberhasilan pendidikan karakter tidak dapat diukur hanya dari aspek pengetahuan moral, melainkan dari kemampuan seseorang mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten (Susanti, 2022). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan berbasis integritas sangat ditentukan oleh pemimpin. Seorang pemimpin harus menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dan keterbukaan sehingga menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat (Rahman dan Hisyam, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Indrayana, integritas bukanlah konsep yang lahir secara instan ketika seseorang menduduki jabatan publik, melainkan hasil dari

proses panjang pembentukan karakter yang dimulai sejak masa pendidikan dan lingkungan keluarga. Menurut beliau, tantangan terbesar dalam menjaga integritas justru muncul ketika seseorang berada dalam posisi yang memiliki kewenangan besar dan berhadapan dengan berbagai kepentingan politik maupun struktural. Dalam pengalaman beliau sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2011–2014, berbagai keputusan strategis sering kali menempatkan pejabat publik pada situasi yang menuntut keberanian moral untuk tetap berpegang pada prinsip hukum dan etika meskipun berpotensi menimbulkan tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, integritas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami nilai yang benar, tetapi juga keberanian untuk mempertahankan nilai tersebut dalam kondisi yang sulit.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang integritas sebagai kombinasi antara kekuatan sistem dan kekuatan personal. Sistem yang baik memang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, namun sistem tidak akan berjalan secara efektif apabila individu yang mengelolanya tidak memiliki komitmen moral yang kuat. Sebaliknya, individu yang berintegritas juga akan menghadapi berbagai hambatan apabila berada dalam sistem yang lemah dan tidak mendukung nilai-nilai kejujuran serta akuntabilitas. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa pembangunan integritas harus dilakukan secara simultan melalui pembentukan karakter individu dan penguatan sistem kelembagaan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari kualitas moral sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Pemikiran Denny Indrayana ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pendidikan karakter yang berkembang dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki integritas moral dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam konteks Indonesia, pendidikan karakter menjadi semakin relevan mengingat berbagai persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis etika yang masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tanpa disertai integritas berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, integritas memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Nilai integritas dapat ditemukan dalam berbagai konsep dasar ajaran Islam seperti amanah, sidq (kejujuran), istiqamah, adil, dan tanggung jawab. Amanah merupakan prinsip yang

mengharuskan seseorang menjaga kepercayaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejujuran menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan penuh kepercayaan. Sementara itu, istiqamah mengajarkan konsistensi dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nilai-nilai tersebut merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter yang berintegritas dan sekaligus menjadi landasan moral bagi kehidupan individu maupun masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk integritas generasi muda. Menurut beliau, salah satu kelemahan pendidikan yang selama ini terjadi adalah terlalu berfokus pada aspek kognitif dan penguasaan materi, sementara aspek pembiasaan nilai dan penguatan karakter belum memperoleh perhatian yang optimal. Akibatnya, banyak peserta didik yang memahami konsep kejujuran, tanggung jawab, dan amanah secara teoritis, tetapi belum mampu mengimplementasikannya secara konsisten dalam kehidupan nyata (Indrayana, 2026.) Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dikembangkan tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, melainkan juga sebagai proses internalisasi nilai yang mampu membentuk perilaku dan karakter peserta didik. Dalam Pendidikan Agama Islam, proses ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pembiasaan perilaku positif, keteladanan guru, dan pendekatan kontekstual (Maulida & Hikmah, 2025). Pendidikan agama tidak cukup hanya mengajarkan dalil-dalil mengenai kejujuran dan amanah, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik mempraktikkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang agama, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menolak segala bentuk perilaku koruptif dalam berbagai situasi.

Nilai Anti-Korupsi dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Telaah Pemikiran Denny Indrayana tentang Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara dan berdampak pada kerugian keuangan negara, mengancam keberlangsungan pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tamher et al., 2024). Dalam berbagai kajian hukum dan sosial, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan harus mendapatkan tindakan hukum khusus karena dampaknya yang luas terhadap

kehidupan masyarakat (Ghiffary et al., 2026). Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan karakter yang mampu membangun kesadaran moral dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai penyimpangan yang ada (Putra et al., 2026). Pendidikan karakter menjadi instrumen penting dalam membentuk individu yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan umum sehingga mampu menolak segala bentuk perilaku koruptif dalam kehidupan pribadi maupun publik. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. *Maqāṣid al-syari'ah* memiliki peran yang penting dan integrasi hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Azwandi, 2026). Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (Assaori et al., 2026). Selain itu, korupsi juga menghambat distribusi kesejahteraan yang adil dan merugikan masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan pelayanan publik. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, Muh Ilham Azis, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Indrayana, korupsi dipandang sebagai masalah struktural sekaligus kultural yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Menurut beliau, korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai perilaku individu yang menyimpang, tetapi juga sebagai fenomena yang berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas pejabat publik, serta belum kuatnya budaya antikorupsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penguatan lembaga hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan generasi yang memiliki kesadaran antikorupsi sejak usia dini. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Denny Indrayana menaruh perhatian besar terhadap pentingnya menjaga independensi lembaga pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan publik. Menurut beliau, pelemahan terhadap lembaga antikorupsi tidak hanya berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi (Indrayana, 2026).

Pemikiran Denny Indrayana tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral yang mampu diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satu nilai utama yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter adalah kejujuran. Kejujuran menjadi fondasi bagi terbentuknya perilaku antikorupsi karena individu yang terbiasa bersikap jujur akan lebih mampu menolak tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika (Indrayana, 2026). Selain kejujuran, pendidikan karakter juga menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kepedulian sosial, dan keberanian moral yang semuanya memiliki kontribusi penting dalam membangun budaya antikorupsi. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai antikorupsi memiliki dasar yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain, penyalahgunaan amanah, serta pengambilan hak yang bukan miliknya. Salah satu nilai utama yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam adalah amanah. Amanah mengandung makna bahwa setiap individu harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah karena pelaku memanfaatkan jabatan atau kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penanaman nilai amanah menjadi salah satu strategi penting dalam pendidikan antikorupsi berbasis agama.

Moralitas Internal Hukum dan Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia

Supremasi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara. Hal ini berarti bahwa supremasi berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi kekuasaan yang sewenang-sewenang (Rangkuti et al., 2026). Namun demikian, keberhasilan supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya peraturan yang dibuat, melainkan juga oleh kualitas moral para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan aturan tersebut. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan ketidakadilan hukum menunjukkan bahwa persoalan hukum sering kali tidak terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada lemahnya integritas dan moralitas para pelaksana hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai moralitas internal

hukum menjadi penting untuk memahami hubungan antara karakter individu, sistem hukum, dan kualitas penegakan hukum dalam suatu Negara. Dengan demikian, hukum yang baik memerlukan manusia yang memiliki karakter baik agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Indrayana, salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada minimnya peraturan perundang-undangan, melainkan pada persoalan integritas dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Menurut beliau, Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang relatif lengkap untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering kali merasakan ketidakpastian hukum dan berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, menurut Denny Indrayana, penguatan supremasi hukum harus dimulai dari pembangunan integritas individu yang menjalankan sistem hukum tersebut.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang persoalan hukum sebagai perpaduan antara faktor sistem dan faktor manusia. Sistem hukum yang baik memang diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Namun, sistem yang baik tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila para pelaksana hukum tidak memiliki komitmen moral yang kuat. Sebaliknya, individu yang berintegritas juga membutuhkan sistem yang mendukung agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari tekanan yang dapat mengganggu independensinya. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada perubahan regulasi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika para aparat penegak hukum sejak dini.

Pandangan Denny Indrayana tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kualitas moral yang baik. Dalam konteks penegakan hukum, pendidikan karakter menjadi fondasi penting karena hukum pada akhirnya dijalankan oleh manusia yang memiliki nilai, keyakinan, dan karakter tertentu. Individu yang memiliki karakter jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menegakkan kebenaran akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara profesional dibandingkan individu yang hanya memiliki kemampuan akademik tanpa didukung integritas

moral yang kuat. Pendidikan karakter menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan proses pembentukan calon pemimpin dan aparat negara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Denny Indrayana menekankan pentingnya membangun integritas sejak masa pendidikan karena karakter seseorang tidak terbentuk secara instan ketika memasuki dunia kerja atau menduduki jabatan publik. Menurut beliau, berbagai bentuk penyimpangan hukum sering kali berakar pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak diperbaiki sejak masa pendidikan, seperti ketidakjujuran, manipulasi, dan sikap tidak bertanggung jawab (Indrayana, 2026.) Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya integritas yang dapat menjadi bekal bagi peserta didik ketika kelak terlibat dalam berbagai profesi, termasuk sebagai aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, moralitas internal hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep akhlak. Islam mengajarkan bahwa hukum tidak hanya dipatuhi karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kesadaran spiritual ini menjadi sumber pengendalian diri yang sangat penting dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengajarkan aspek ibadah ritual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika yang menjadi dasar dalam menjalankan berbagai tanggung jawab sosial dan profesional. Beberapa nilai utama Pendidikan Agama Islam yang relevan dengan moralitas internal hukum adalah amanah, kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan istiqamah. Amanah mengajarkan bahwa setiap jabatan dan kewenangan merupakan titipan yang harus digunakan untuk kepentingan yang benar. Kejujuran menjadi fondasi utama dalam proses penegakan hukum karena tanpa kejujuran hukum akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Keadilan mengharuskan setiap individu memperlakukan orang lain secara proporsional tanpa diskriminasi. Sementara itu, tanggung jawab dan istiqamah membentuk konsistensi dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.

Berdasarkan hasil wawancara, Denny Indrayana menegaskan bahwa penguatan integritas aparat hukum perlu dimulai jauh sebelum seseorang memasuki lembaga penegak hukum. Menurut beliau, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menjalankan profesi. Pendidikan Agama

Islam dapat berkontribusi melalui penguatan kesadaran bahwa keadilan bukan sekadar kewajiban profesional, tetapi juga bagian dari perintah agama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami hukum sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang pentingnya keteladanan dalam proses pembentukan moralitas hukum. Nilai-nilai hukum akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi apabila peserta didik melihat contoh nyata dari para pendidik, pemimpin, dan aparat negara yang menjalankan tugasnya secara jujur dan adil. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan Pendidikan Agama Islam perlu dikembangkan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan budaya sekolah dan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab (Indrayana, 2026)

Keteladanan sebagai Instrumen Pendidikan Karakter dan Pencegahan Korupsi

Keteladanan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan karakter individu. Dalam kehidupan sosial, seseorang tidak hanya belajar melalui nasihat, aturan, atau teori yang diajarkan kepadanya, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang dianggap memiliki otoritas, pengaruh, atau kedudukan tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan materi pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas keteladanan yang ditunjukkan oleh para pendidik yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik (Abidin, 2021). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keteladanan menjadi semakin penting karena perilaku para pemegang kekuasaan sering kali menjadi rujukan masyarakat dalam memahami nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan publik. Ketika para pemimpin menunjukkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai moral, masyarakat akan lebih mudah mengembangkan budaya kejujuran dan tanggung jawab (Locella et al., 2026). Sebaliknya, apabila para pemimpin terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, maka nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima dalam kehidupan sosial.

Konsep keteladanan memiliki hubungan yang erat dengan teori *Social Learning* yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, manusia belajar melalui proses

berpikir, memahami, dan evaluasi (Hikmatu Ruwaida, 2020). Pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap tindakan dan konsekuensi yang diterima oleh orang lain. Dalam teori ini, figur yang memiliki status sosial tinggi atau dianggap berhasil cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu. Dengan demikian, keteladanan menjadi instrumen yang sangat efektif dan dapat menjadi salah satu metode dalam pendidikan karakter karena memungkinkan nilai-nilai moral ditransformasikan menjadi perilaku nyata yang dapat diamati dan ditiru oleh peserta didik (Fadil Mas'ud, 2026). Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Indrayana, keteladanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya membangun budaya integritas dan mencegah korupsi. Menurut beliau, regulasi yang baik dan sistem pengawasan yang kuat memang diperlukan, tetapi keduanya tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh figur-figur yang mampu menunjukkan contoh nyata dalam menjalankan nilai-nilai integritas. Dalam pandangannya, masyarakat sering kali menilai kesungguhan suatu kebijakan bukan hanya dari isi peraturan yang dibuat, tetapi juga dari perilaku para pemimpin yang bertanggung jawab melaksanakannya (Indrayana, 2026). Oleh karena itu, keteladanan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang figur pejabat publik memiliki tanggung jawab moral yang besar karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan menjadi perhatian masyarakat. Menurut beliau, pejabat publik tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan politik, tetapi juga berperan sebagai simbol nilai yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Ketika pejabat publik menunjukkan komitmen terhadap kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai institusi negara. Sebaliknya, ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, hal tersebut dapat menimbulkan sikap apatis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keteladanan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar perilaku individu karena berkaitan dengan pembentukan budaya sosial dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan karakter, pemikiran Denny Indrayana menunjukkan bahwa keteladanan merupakan metode yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Pendidikan karakter tidak cukup hanya mengajarkan konsep kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui teori di dalam kelas, tetapi juga harus menghadirkan contoh konkret yang dapat diamati oleh peserta didik. Ketika peserta didik

melihat guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin masyarakat yang konsisten menjalankan nilai-nilai tersebut, proses internalisasi peserta didik pada kehidupan sehari-hari (Suriati, Hamdanah, Usman, Muzakkir, 2024). Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang ditunjukkan oleh figur yang menjadi panutan, maka peserta didik akan mengalami kebingungan moral yang dapat menghambat pembentukan karakter positif. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang memiliki kedudukan sangat penting. Islam menempatkan Rasulullah Muhammad sebagai teladan utama bagi umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik (*uswah hasanah*). Konsep *uswah hasanah* merupakan kecenderungan menirukan orang lain (Sanusi et al., 2024). Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui keteladanan yang diberikan oleh guru, orang tua, dan pemimpin masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Denny Indrayana menekankan bahwa salah satu tantangan dalam pendidikan karakter saat ini adalah kurangnya figur teladan yang dapat dijadikan rujukan oleh generasi muda. Menurut beliau, perkembangan teknologi informasi memungkinkan peserta didik mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber, termasuk figur publik yang tidak selalu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memperkuat peran guru dan lingkungan sekolah sebagai ruang yang mampu menghadirkan keteladanan positif bagi peserta didik. Selain itu, negara juga perlu mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas. Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas keteladanan para pemimpin. Menurut beliau, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung berbagai program reformasi apabila melihat adanya konsistensi antara kebijakan yang disampaikan dengan perilaku para pemimpin yang menjalankannya (Indrayana, 2026). Dalam konteks ini, keteladanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun budaya antikorupsi. Ketika masyarakat melihat kepemimpinan yang berintegritas dan mendorong perilaku jujur serta tanggung jawab. Hal ini mendorong seseorang untuk mampu mengimplementasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari (Nur, dkk., 2026).

Integritas, Etika Ruang Publik, dan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Perkembangan demokrasi modern telah menempatkan ruang publik sebagai arena penting dalam pembentukan opini, pengawasan kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang publik tidak hanya dipahami sebagai tempat bertemunya berbagai pandangan dan kepentingan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dialog yang rasional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam masyarakat demokratis, kualitas ruang publik sangat dipengaruhi oleh etika para aktor yang terlibat di dalamnya, baik pejabat negara, akademisi, tokoh masyarakat. Ruang publik menjadi ruang bagi siapapun untuk dapat berkomunikasi dengan bebas dan tetap menghargai satu sama lain sehingga tetap membentuk solidaritas di tengah kehidupan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan (Angga, dkk., 2023)

Pemikiran mengenai pentingnya etika dalam ruang publik banyak dipengaruhi oleh teori Jürgen Habermas. Menurut Habermas dalam artikel ilmiah Angga dkk., ruang publik yang demokratis harus dibangun melalui komunikasi yang rasional, terbuka, jujur, dan bebas dari dominasi yang merugikan kepentingan masyarakat (Angga, dkk. 2023). Legitimasi dalam kehidupan demokrasi tidak hanya lahir dari kekuasaan formal, tetapi juga dari proses komunikasi yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangannya secara bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, integritas menjadi syarat utama agar komunikasi publik dapat menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Integritas menjadi landasan yang penting agar setiap pihak yang terlibat pada ruang publik dapat menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab dan lebih mementingkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Indrayana, integritas dalam ruang publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Sebagai akademisi, praktisi hukum, dan mantan pejabat negara, beliau menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam diskursus publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pendapat berdasarkan fakta, argumentasi yang rasional, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa. Menurut beliau, kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun praktik penyelenggaraan negara merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi (Indrayana, 2026). Namun demikian, kritik harus disampaikan dengan cara yang beretika, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertujuan

untuk menyebarkan kebencian atau memperkeruh kehidupan sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Denny Indrayana memandang keberanian menyampaikan kritik dan menjaga integritas sebagai dua hal yang saling berkaitan. Menurut beliau, integritas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kejujuran dalam mengelola jabatan publik, tetapi juga dalam keberanian menyampaikan kebenaran ketika melihat adanya penyimpangan terhadap prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan. Dalam praktiknya, keberanian tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik, perbedaan kepentingan, maupun risiko social (Indrayana, 2026). Oleh karena itu, seseorang memerlukan fondasi karakter yang kuat agar mampu mempertahankan prinsip-prinsip moral ketika berpartisipasi dalam ruang publik.

Dalam konteks pendidikan karakter, pandangan Denny Indrayana memberikan pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk individu yang patuh terhadap aturan, tetapi juga membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun kesadaran etis dalam menyampaikan pendapat. Sikap kritis tanpa landasan moral berpotensi melahirkan perilaku yang destruktif, sedangkan moralitas tanpa kemampuan berpikir kritis dapat menyebabkan seseorang pasif terhadap berbagai bentuk ketidakadilan (Indrayana, 2026). Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu mengintegrasikan nilai integritas, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, dan kepedulian sosial agar peserta didik mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan demokratis. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Denny Indrayana menilai pendidikan memiliki peran penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Menurut beliau, peserta didik perlu dibiasakan untuk menyampaikan pendapat secara santun, menghargai perbedaan pandangan, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang rasional. Kemampuan tersebut tidak hanya penting dalam kehidupan akademik, tetapi juga menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemberantasan korupsi.

Nilai-nilai yang ditekankan meliputi kejujuran, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keberanian moral.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam bidang pendidikan karakter dan pendidikan anti-korupsi. Penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai integrasi nilai-nilai keislaman dengan pemikiran tokoh kontemporer Indonesia dalam membangun budaya integritas. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa pemikiran dan praktik kenegaraan Denny Indrayana dapat dijadikan salah satu landasan konseptual dalam pengembangan model pendidikan karakter berbasis nilai integritas dan anti-korupsi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada berbagai jenjang pendidikan secara lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) untuk mengukur efektivitas pendidikan karakter berbasis integritas dalam membentuk perilaku antikorupsi peserta didik. Selain itu, kajian komparatif dengan tokoh-tokoh nasional lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu integritas, pendidikan karakter, dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan guna memperluas perspektif serta memperkaya pengembangan teori pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). Manajemen peningkatan mutu pendidikan karakter berbasis agama, budaya, dan sosiologi. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 4(1), 181–202. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.167>
- Al Ghiffary, M. S., Tahir, H., & Syarif, K. A. (2026). Analisis sosio-yuridis tentang eksistensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *LEX PINISI: Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 1(1), 47–52. <https://journal.unm.ac.id/index.php/PIJAR/article/view/12425>
- Amroellah, A., Pratidina, B. A., Putra, M. A., & Haikal, A. H. (2026). Penguatan nilai-nilai integritas pada siswa terhadap anti korupsi dan Pancasila di SD Negeri 1 Dawuhan Situbondo. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 10(1), 366–375. <https://doi.org/10.36841/integritas.v10i1.8264>
- Angga, S., Poa, A. A., & Rikardus, F. (2023). Etika komunikasi netizen Indonesia di media sosial sebagai ruang demokrasi dalam telaah ruang publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229>
- Ar Rahman, M. Y., & Hisyam, R. (2025). Membangun Indonesia berintegritas: Nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.55080/junagara.v2i1.1885>

- Assaori, M. S., Sakti, L., Rizal, P., & Rosikhu, M. (2026). Unsur penyalahgunaan wewenang dalam perspektif undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(2), 130–140. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2015>
- Azwandi, & Ridwan, M. (2026). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.32520/fvy5a134>
- Burhanudin, A. A. (2022). Peran perguruan tinggi dalam penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan anti korupsi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137–149. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/872>
- Kafrawi, T. S. H. M., Azis, M. I., & Fikri, M. (2025). Korupsi sebagai *extraordinary crime*: Telaah maqāṣid al-syarī'ah dan implementasi sanksi ta'zīr dalam hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 226–234. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1386>
- Locella, A., Sihaan, S. A. P., & Setiawan, S. (2026). Membangun integritas mahasiswa untuk melawan korupsi di kampus. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMLA)*, 3(2), 951–962. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9631>
- Mas'ud, F., Kontesa, A. F., Letma, F., Toga, T. K. H., Bau, M. F., Bana, F., Tutoq, R., Alunat, N. F., Lani, S. I., Baru, M. C., & Anin, T. (2026). *Anti korupsi sebagai pedagogi moral: Strategi kurikulum dan transformasi karakter bangsa*. Tangguh Denara Jaya Publisher. <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/764>
- Maulida, N. N., Hikmah, N., & Faelasup. (2025). Analisis konsep, nilai, dan strategi efektif dalam implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran PAI. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 458–469. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/juperan/article/view/905>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nur, M., Rosmawiah, Tamrin, & Efendi, S. (2026). *Pendidikan antikorupsi: Membangun integritas sejak dini*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Putra, A. P., Febriansyah, C., & Satria. (2026). Peran pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter generasi muda. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 18(7). <https://doi.org/10.2238/q0g4b172>
- Rangkuti, A. (2026). Negara hukum dan demokrasi dalam perspektif konstitusional. *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 4(1), 20–34. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/28711>
- Ruwaida, H. (2020). Belajar sosial: Interrelasi antara individu, lingkungan, dan perilaku dalam pembelajaran Fiqih di MI Miftahul Anwar Desa Banua Lawas. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 217–236. <https://doi.org/10.35931/am.v4i2.316>
- Sanusi, I., Suhartini, A., Nurhakim, H. Q., Nuraeni, U., & Muhammad, G. (2024). Konsep *uswah hasanah* dalam pendidikan Islam. *Masagi: Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/masagi.v1i1.3523>
- Saputra, D. M. A., Samsuri, & Ansori. (2026). Internalisasi nilai amanah melalui pendidikan anti korupsi dalam penguatan karakter integritas peserta didik. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 10(2), 493–510. <https://doi.org/10.46773/hjy41v89>

- Suriati, Hamdanah, Usman, Muzakkir, & Dalle, A. (2024). Strategi guru dalam penanaman kedisiplinan dan kejujuran peserta didik di MI DDI Bottoe Kecamatan Tanete Rilau. *DLALEKTIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 60–71. <https://doi.org/10.35905/dialektika.v3i2.12710>
- Susanti, S. E. (2022). Pendidikan karakter dalam membangun kecerdasan moral bagi anak usia dini perspektif Thomas Lickona. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i1.3396>
- Suyadi, Sumaryati, Hastuti, D., Yusmaliana, D., & Rahmah MZ, R. D. (2019). Constitutional piety: The integration of anti-corruption education into Islamic religious learning based on neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8307>
- Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-03>
- Tamher, S., Latunussa, S. B. A., & Budiman, E. A. (2024). Implementasi kebijakan anti-korupsi di negara hukum. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(4), 310–317. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.327>